

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membuat beberapa unsur metodologi yang harus dipenuhi dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah. Maka pada bagian ini pula akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori (kerangka berfikir), hipotesis, manfaat penulisan, metode penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal kelahirannya, sikap ambivalen Ikhwanul Muslimin terhadap demokrasi merupakan bagian dari keyakinannya bahwa dunia Islam tengah berjuang untuk mempertahankan diri di tengah ancaman peradaban global akibat Perang Dingin. Kaum Muslim terjebak di antara Barat kapitalis yang menekankan sekularisme, individualisme, dan materialisme dan Timur komunis/sosialis dan ateis yang bercirikan kediktatoran dan kelaliman<sup>1</sup>. Kedua alternatif tersebut, yang memiliki sistem partisipasi politiknya sendiri-sendiri, dinilai telah gagal dan pada saat yang sama dianggap sebagai ancaman. Ikhwanul Muslimin percaya bahwa ajaran Islam merupakan alternatif Muslim yang otentik dan membumi bagi komunitas Barat dan Timur sehingga berisiko kehilangan identitas dan cenderung mengalami kegagalan.

Ikhwan mengkritik demokrasi Barat, terutama karena menciptakan ketergantungan pada ideologi atau bentuk-bentuk pemerintahan asing. Hasan Al-Banna dan para pemimpin Ikhwanul Muslimin awal, menerima prinsip-prinsip pemerintahan perwakilan dan partisipasi politik. Namun, mereka menolak partai politik atau partaisme (*hizbiyah*) karena dipandang

---

<sup>1</sup> Richard Mitchel, *The Society of Muslim Brotherhood*, edisi ke-2 (London: Oxford University Press, 1969), hal. 226.

dapat menimbulkan perpecahan dan terbukti dimanfaatkan pihak penguasa Mesir untuk mempraktekkan kezhaliman. Mereka percaya bahwa partai-partai itu tidak dibutuhkan dalam sistem pemerintahan perwakilan; demokrasi hanya mensyaratkan jaminan bagi kebebasan berpendapat dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Tanpa ‘partaisme’, sistem parlementer sangat sesuai dengan Islam<sup>2</sup>.

Ikhwan menerapkan proses pemilihan secara internal di tubuh organisasinya dan berpartisipasi (jika tidak diizinkan, menuntut hak untuk berpartisipasi) dalam politik nasional. Bagi Ikhwan, partisipasi politik atau demokrasi hanyalah sarana untuk mencapai tujuan, sebab segala sesuatu dikerahkan dalam rangka melestarikan dan menyebarkan Islam.

Dalam perkembangannya, setelah muncul kembali pada 1970-an. Ikhwanul Muslimin dengan tegas memutuskan untuk berpartisipasi dalam sistem politik yang ada dari pada melakukan revolusi dengan kekerasan; Ikhwan memanfaatkan demokrasi untuk mengkritik pemerintah, untuk mencapai tujuannya, atau untuk mendukung perjuangan Islam sebesar-besarnya.

Partai politik, para elit politik, dan kepartaian adalah aspek yang paling tidak bisa diterima oleh Ikhwanul Muslimin dalam skenario politik Mesir. Menurut Ikhwanul Muslimin, partai-partai dikendalikan oleh ideologi dan kepentingan pribadi; tidak ada program dan tujuan yang jelas; aktifitas mereka diatur oleh figur-figur ‘orang’ bukan gagasan. Pada hakikatnya partai-partai itu hanya menjadi front kapitalisme, alat politik yang dipergunakan oleh kaum kapitalis untuk mengeksploitasi para buruh dan menyalahgunakan undang-undang dan aparatur administrasi negara untuk melayani tujuannya sendiri, dengan dalih menjadi

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 261.

pengabdian rakyat, partai politik malah menguasai rakyat secara tidak sah karena mereka tidak merefleksikan kehendak bangsa dan kepentingannya<sup>3</sup>.

Sikap ini berangkat dari asumsi yang melihat partai politik dan para elitnya hanya menjadi agen perpecahan dan keretakan bangsa, karena mereka telah tercerabut dari rakyat dan tidak memiliki empati kerakyatan. Di samping itu, sistem kepartaian melemahkan kekuatan nasional selama pergumulan politik yang kompleks demi meraih kemerdekaan politik dan reformasi internal, karena negara telah terpecah-belah menjadi kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab dan saling bertikai, negara kehilangan persatuan, dan dengan demikian tidak mampu meraih kemerdekaan maupun kemajuannya<sup>4</sup>.

Korupsi dalam tubuh partai dan elit partai memiliki konsekuensi politis yang krusial; kehidupan parlemen dan pemerintah yang demokratis telah gagal. *Upper Class* yang menguasai politik dan ekonomi memonopoli pemerintahan. Rakyat terpaksa memilih para wakilnya dari antara penindas-penindas mereka; tuan tanah mengendalikan suara para petani penyewa tanah, para lintah darat mengendalikan suara para debitornya – golongan rakyat yang kelaparan-, rakyat menjadi korban tirani politik dan ekonomi. Meskipun Inggris menghadiahkan sistem parlementer kepada rakyat Mesir dengan maksud agar Mesir diperintah oleh orang Mesir sendiri, namun sistem tersebut menjadi topeng Inggris untuk merampas hak dan kekayaan rakyat.

Administrasi pemerintahan juga menjadi korban partai politik yang korup. Wajah birokrasi secara umum diwarnai dengan inefisiensi, kekacauan dan korupsi, penyalahgunaan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 296.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 297.

kekuasaan, dan kekuatan personal; penunjukkan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu dilakukan tanpa mengindahkan kualifikasi dari para calon pejabat.

Situasi ini menimbulkan komplikasi yang tidak bisa ditoleransi lagi dalam berurusan dengan pemerintah; setiap orang yang hendak memasukkan anaknya ke sekolah, masuk ke rumah sakit, mendapat tender bisnis dari pemerintah, pergi keluar negeri, atau ingin mencari pekerjaan harus melalui perantara atau merasa bahwa ia harus memerlukan perantara tersebut.

Hal ini bisa dijelaskan dengan dua penafsiran:

1. lemahnya supermasi hukum dan kepercayaan rakyat terhadapnya, karena pemerintahan dipegang oleh pejabat-pejabat yang korup.
2. sentralisasi kekuasaan pada penguasa-penguasa yang berkuasa penuh sampai pada taraf bahwa seorang bawahan tidak berani mengambil alih tanggung jawab dan hanya menjadi alat yang tidak memiliki inisiatif maupun kehendak<sup>5</sup>.

Sementara itu, pandangan Ikhwanul Muslimin terhadap sistem demokrasi Barat memang bisa menciptakan proses politik yang memuaskan, akan tetapi demokrasi telah menyebabkan kerusakan individu dan masyarakat; demokrasi juga menyebabkan hilangnya tanggung jawab moral, degenerasi, dan kekacauan sosial, semua hal tersebut mempercepat krisis dalam keluarga merendahkan martabat kaum wanita dan melemahkannya, serta rusaknya sistem keluarga.

Di lain pihak, demokrasi menjadi seperti sinonim dari kapitalisme dan kebebasan mempraktekkan sistem riba. Dan terakhir, di negara-negara pelopor demokrasi di barat, kegagalan mewarnai upaya-upaya penyelesaian isu-isu ras di atas basis persamaan (*equality*)

---

<sup>5</sup> Ahmad Faris, MA dalam jurnal "TRANSFORMASI IKHWANUL MUSLIMIN DARI GERAKAN SOSIAL KE GERAKAN POLITIK"

dan keadilan; Amerika Serikat menjadi pembela dan pemimpin ‘kekaisaran bangsa kulit putih’<sup>6</sup>.

Setelah berjuang cukup lama dalam dunia politik, akhirnya Ikhwanul Muslimin berhasil mencapai puncaknya. Ikhwanul Muslimin berhasil mencapai Puncaknya setelah memenangi pemilu di Mesir pada tahun 2012 dan menjadikan Mursi sebagai Presiden dari kalangan diluar militer yang diusung oleh Ikhwanul Muslimin, Ikhwanul Muslimin sangat berkuasa dalam pemerintahan, hal ini dapat dilihat dari Dalam sebulan, Mursi menunjuk anggota Ikhwanul Muslimin untuk menjabat di berbagai lembaga negara. Setidaknya ada 5 kader Ikhwanul Muslimin dijadikan pejabat di berbagai departemen, 8 di kantor kepresidenan, 7 jadi gubernur, 12 jadi asisten gubernur, 13 di kantor gubernur, dan 12 sebagai walikota<sup>7</sup>.

Ketidak mampuan Ikhwanul Muslimin dan presiden Mursi dalam mengelola pemerintahan banyak membuat berbagai pihak kecewa dan marah inilah yang selama setahun kekuasaan Mursi dan IM membentuk kelompok oposisi yang kuat. Mereka hampir setiap hari berdemonstrasi menentang setiap kebijakan Presiden Mursi. Mereka menuduh Mursi dan Ikhwanul Muslimin ingin menjadikan Mesir sebagai negara Ikhwanul Muslimin (*Akhunatu Al Daulah*). Apalagi pengaruh Ikhwanul Muslimin terbukti merasuk di hampir semua lini kehidupan. Dari kehidupan sosial, keagamaan, hingga bisnis dan lainnya.

Kondisi Mesir yang sudah mulai goyah membuat Mursi dan Ikhwanul Muslimin menawarkan dialog dan bahkan berbagi kekuasaan, kelompok oposisi menolak tawaran tersebut. Karena mereka menilai tawaran itu sudah terlambat, Apalagi posisi Mursi dan

---

<sup>6</sup> *ibid*

<sup>7</sup> <http://news.liputan6.com/read/631367/10-dosa-penyebab-mursi-digulingkan-militer-mesir> (di akses pada tanggal 24 september 2014)

Ikhwanul Muslimin sudah mulai terdesak. Mereka bahkan bertekad segera mengakhiri kekuasaan Mursi dan Ikhwanul Muslimin. Untuk melaksanakan tujuan tersebut mereka melilih berkoalisi dengan militer, kepolisian, dan sisa-sisa rezim Mubarak di lembaga-lembaga tinggi negara yang dulu mereka lawan. Oleh sebab itu bisa dimengerti bila aparat keamanan dan hukum sengaja melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi unjuk rasa menentang Mursi dan Ikhwanul Muslimin. Hampir sepanjang setahun, pemerintahan Presiden Mursi terus digoncang demonstrasi dan tindak kriminalitas. Gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban nasional) ini pada gilirannya menyulitkan roda pemerintahan Mursi.

Akhirnya pada tanggal 3 Juli 2013, menteri pertahanan Abdul Fattah As -Sisi menggulingkan Mursi hanya setelah satu tahun memimpin<sup>8</sup>. Dan rezim Militer mulai berkuasa kembali memmimpin roda pemerintahan Mesir, untuk menjaga keterbelangsungan rezim militer, maka anggota-anggota Ikhwanul Muslimin kembali dikejar, ditangkap, ditahan, disidang, bahkan ribuan demonstran telah dibunuh. Bahkan pada tanggal 25 Desember 2013 Pemerintah Mesir yang didukung militer mengumumkan Ikhwanul Muslimin sebagai sebuah kelompok teroris. Pemerintah Mesir melarang semua kegiatan Ikhwanul, termasuk demonstrasi. Keputusan itu akan mempercepat operasi penumpasan gerakan (Ikhwanul Muslimin) tersebut yang telah menewaskan lebih dari seribu orang yang sebagian besar militan dalam bentrokan di jalan. Ribuan orang juga ditahan sejak penggulingan Mursi oleh militer pada Juli 2013.

Keputusan itu disampaikan sehari setelah serangan bom mobil bunuh diri terhadap kantor keamanan yang menewaskan 16 orang tepatnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013, pengumuman itu disampaikan oleh Hossam Eissa, Menteri Pendidikan Tinggi Mesir,

---

<sup>8</sup> <http://www.sinaimesir.net/2013/09/jejak-rekam-pembubaran-ikhwanul.html> (diakses 2 september 2014)

membacakan pernyataan Kabinet itu sesuai rapat panjang. Ia mengatakan: “Kabinet telah menyatakan kelompok Ikhwanul Muslimin dan organisasinya sebagai organisasi teroris.” “Mustahil bagi negara Mesir ataupun rakyat Mesir tunduk pada terorisme Ikhwanul Muslimin,” tambah Hossam<sup>9</sup>.

Ia mengatakan keputusan itu diambil menanggapi pemboman fatal hari Selasa yang menarget markas besar polisi di kota Delta Nil, dimana 16 orang tewas dan lebih 100 lainnya cedera. Ikhwanul membantah mereka bertanggung jawab atas serangan di Mansoura itu, sementara sebuah kelompok al-Qaida hari Rabu mengaku bertanggung jawab atas bom bunuh diri itu.

Bukan hanya itu saja, bahkan Pemerintah interim Mesir berencana meminta Organisasi Kepolisian Kriminal Internasional (Interpol) dan PBB untuk memasukkan Ikhwanul Muslimin (IM) sebagai kelompok teroris dalam daftar mereka. Demikian diungkapkan salah seorang pejabat Departemen Kehakiman Tinggi Mesir.

Bahkan Asisten Menteri Adel Fahmi pada jumat 27 Desember 2013 mengatakan, jika PBB setuju memasukkan Ikhwanul Muslimin dalam daftar kelompok teroris, maka Mesir dapat meminta negara lain untuk menangkap anggota organisasi internasional itu. “Termasuk juga meminta negara yang bersangkutan untuk menyita aset mereka,” kata Fahmi. Pemerintah interim Mesir juga telah meminta Liga Arab agar memberitahukan negara - negara anggotanya mengenai keputusan soal label ‘teroris’ terhadap Ikhwanul Muslimin<sup>10</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

---

<sup>9</sup> <http://www.voaindonesia.com/content/mesir-nyatakan-ikhwanul-muslimin-kelompok-teroris> (diakses 20 Agustus 2014)

<sup>10</sup> <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/12/27/myfwpp-mesir-desak-pbb-masukan-im-ke-daftar-teroris> (diakses 20 Agustus 2014)

Berdasarkan rangkaian latar belakang diatas mendorong penulis untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana strategi politik Ikhwanul Muslimin terhadap kebijakan pemerintah Mesir yang memutuskan Ikhwanul Muslimin sebagai Organisasi Terorris pasca digulingkannya Mursi?”

### **C. Kerangka Dasar Pemikiran**

Berkaitan dengan kajian penelitian ini, maka penulis menawarkan kerangka pemikiran yaitu Gerakan Islam Transnasional.

Sebelum membahas lebih jauh tentang kerangka dasar pemikiran, maka penulis akan lebih dulu menjelaskan tentang strategi dan taktik. pengertian strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Dalam abad modern ini, penggunaan istilah strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas hampir dalam semua bidang ilmu. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat kemenangan atau pencapaian tujuan.<sup>11</sup> Sedangkan kata “taktik” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*taktike*” yang berarti “pengaturan pasukan”, dan dalam KBBI memiliki arti: “rencana atau tindakan yg bersistem untuk mencapai tujuan; pelaksanaan strategi; siasat”.

Untuk dapat memahami dengan baik konseps tentang Gerakan Islam Transnasional, maka pada kesempatan pertama ini perlu kiranya dimengerti apa itu “lembaga” dan “organisasi”, perbedaan di antara keduanya, serta pelembagaan sebagai proses yang menghubungkannya.

---

<sup>11</sup> [http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-strategi-menurut-para-ahli.html#\\_](http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-strategi-menurut-para-ahli.html#_) (diakses pada 15 november 2014)



Istilah “lembaga”, menurut Ensiklopedia Sosiologi diistilahkan dengan “institusi” sebagaimana didefinisikan oleh Macmillan adalah merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang.<sup>12</sup>

Amitai Etzioni mengatakan bahwa masyarakat terdiri organisasi-organisasi, dimana hampir dari semua dari kita melewati masa hidup dengan bekerja untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian organisasi adalah suatu unit sosial (pengelompokan sosial) yang sengaja dibentuk dan dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Namun untuk mendefinisikan organisasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Hal ini karena organisasi merupakan sesuatu yang abstrak, sulit dilihat namun bisa dirasakan eksistensinya.<sup>13</sup>

Gerakan Islam Transnasional adalah sebuah gerakan atau organisasi yang melintasi batas – batas negara dengan membawa ideologinya tersebut pada negara yang dituju, dan sebelum membahas lebih lanjut tentang Gerakan Islam Transnasional, penulis lebih dulu akan membahas tentang Transnasional.

Istilah transnasionalisme pertama kali muncul di awal abad ke 20 untuk menggambarkan cara pemahaman baru tentang hubungan antar kebudayaan. Ia adalah sebuah gerakan sosial yang tumbuh karena meningkatnya interkoneksi antar manusia di seluruh permukaan bumi dan semakin mudarnya batas-batas negara. Perkembangan telekomunikasi, khususnya internet, migrasi penduduk dan terutama globalisasi menjadi pendorong perkembangan transnasionalisme ini.

---

<sup>12</sup> Saharuddin. 2001. *Nilai Kultur Inti dan Institusi Lokal Dalam Konteks Masyarakat Multi-Etnis*. Bahan Diskusi Tidak Diterbitkan. Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

<sup>13</sup> Etzioni, Amitai. 1985. *Organisasi-Organisasi Modern*. Terjemahan. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Menurut Thomas L. Friedman<sup>14</sup>, globalisasi yang menjadi pendorong utama gerakan transnasionalisme adalah sebuah sistem dunia abad 21 yang menitikberatkan kepada integrasi dunia yang tidak mengenal sekat sama sekali. Selain penerapan konsep pasar bebas, runtuhnya tembok Berlin dan munculnya internet merupakan tonggak penting bagi babak baru yang dinamakan globalisasi. Menurut Friedman, globalisasi memiliki tiga landasan keseimbangan:

1. keseimbangan tradisional yang menandai hubungan antar bangsa (nation state).
2. keseimbangan antara suatu bangsa/negara dengan pasar ekonomi dunia (global market).
3. keseimbangan antara individu dan negara (individual and the nation state).

Apabila landasan pertama menitikberatkan kepada peran negara, landasan kedua lebih menonjolkan peran pasar di dalam menentukan kejadian-kejadian yang ada di dunia. *Super power* dan *supermarket* mendominasi kedua landasan ini. Sementara itu, keseimbangan ketiga muncul ketika batas negara telah runtuh dan dunia telah dihubungkan satu dengan lainnya dengan sebuah jaringan yang sangat luas. Hal ini memungkinkan bagi perorangan/individu untuk tampil di panggung dunia tanpa perantara negara dan mampu mempengaruhi pasar maupun keberadaan sebuah negara. Pada tingkatan inilah muncul apa yang dinamakan dengan *super-empowered individuals* yang mana individu-individu ini dapat berbuat apa saja di panggung dunia, baik ataupun buruk, yang dapat merepotkan dunia.

Dengan memanfaatkan kemudahan-kemudahan akses telekomunikasi, transportasi dan teknologi, *super-empowered individuals* mampu menjalankan aksi-aksinya dengan mudah dan

---

<sup>14</sup> Seorang jurnalis kolom dwimingguan di *The New York Times*

efek yang ditimbulkan akan dapat diketahui dan dirasakan oleh seluruh penduduk dunia dalam waktu yang sangat singkat.

Sebenarnya Islam dan Transnasional tidak dapat dipisahkan karena Islam jelas merupakan agama transnasional, baik dari segi doktrin teologis maupun legal fihiyyah, yang melintasi batas-batas kabilah, suku, bangsa, ras dan seterusnya. Islam adalah agama bagi seluruh umat manusia yang beragam dari berbagai segi. Jika ada distingsi yang ditekankan doktrin Islam di tengah berbagai realitas transnasional tersebut, maka itu adalah ketaqwaan belaka. Tidak ada beda ada individu dan kelompok Muslim dengan lainnya, kecuali hanya ketaqwaannya—ketundukan dan kepasrahan sepenuhnya kepada Allah SWT.<sup>15</sup>

Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa Gerakan Islam Transnasional adalah kelompok Islam yang berkeyakinan bahwa Islam merupakan ajaran Universal menembus/menegasi batas-batas ruang dan negara, sehingga perlu adanya “satu kepemimpinan Islam” (khilafah) bagi seluruh kaum muslimin di dunia. Untuk itulah, menjadi maklum bila setiap orang / kelompok beragama mengklaim bahwa ekspresi keberagamaan yang mereka tampilkan adalah bukti cinta (taat) Nya yang paling benar kepada Sang Ilahi. Sebab, sebuah ekspresi keberagamaan memang menuntut demikian. Tak aneh bila Alfred North Whitehead, dalam *Religion in The Making*, mengatakan bahwa: “Ekspresi itu satu sakramen fundamental. Ia sebuah tanda yang dapat dilihat nan lahir dari sebuah penghayatan spiritual yang batini. Dan hal utama yang tampil dalam sebuah ekspresi itu bukan sekadar bentuk lelatu dan sejumlah kata-kata, tapi juga bagian sebuah seni.”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Azyumardi Azra dalam jurnal “*Muhammadiyah: Tantangan Islam Transnasional*” dalam kumpulan jurnal Maarif vol 4 no.2 – desember 2009

<sup>16</sup> Muaz. A dalam jurnal “*membincang gurita islam transnasional*”

Asumsi rasa kecintaan dan cara mengekspresikan kecintaan pada Sang Khalik itulah yang membuat kelompok (gerakan) Islam di Indonesia begitu meriah, tidak monolit, dan fragmentatif. Pada titik inilah, bisa fahami, kenapa gerakan Islam transnasional tampak begitu menggurita, menunjukkan identitasnya, di Indonesia. Ikhwanul Muslimin, sebagai salah satu representasi Islam transnasional<sup>17</sup>.

Ikhwanul muslimin bisa menjadi Gerakan Islam transnasional kerana memenuhi kriteria sebagai berikut<sup>18</sup> :

- Bersifat transnasional.
- Ideologi gerakan tidak lagi bertumpu pada konsep *nation-state*, melainkan konsep umat.
- Didominasi oleh corak pemikiran skripturalis, fundamentalisme atau radikal.
- Secara parsial mengadaptasi gagasan dan instrumen modern.

Gerakan Wahabi lah yang sebenarnya membayangkan lahirnya Ikhwanul Muslimin oleh Hassan Al-Banna di Mesir pada 1928. Pendiri gerakan itu berpandangan, ancaman Barat yang tidak hanya berbentuk fisik tapi juga intelektual dan spiritual harus dilawan dengan kembali pada dasar-dasar Islam, dan perlunya al-nizham al-islami, negara atau sistem Islam. Setelah kematian Al-Banna akhir 50-an gagasan ideologi selanjutnya dikobarkan oleh sang ideolog handalnya Sayyid Qutb. Tokoh ini sendiri dieksekusi pemerintah Mesir pada 1966. sebelumnya, setelah kebijakan represi dilakukan pemerintah Mesir, sebagian aktivis Ikhwanul Muslimin mengungsi ke Arab Saudi. Salah satunya adalah

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid

Said Ramadhan yang kemudian menjadi salah seorang pendiri Rabithah al-Alam Islami. Menantu al-Banna ini kemudian pindah ke Jenewa untuk mengembangkan ideologi Ikhwan di kawasan Eropa. Muhammad Qutb, adik kandung Sayyid Qutb juga ikut pindah ke Arab Saudi yang kemudian menjadi dosen di King Abdul Aziz University Jeddah dan mengajar Osama bin Laden, salah seorang mahasiswanya<sup>19</sup>.

Sebagai eksistensi Gerakan Islam Transnasional sampai saat ini persebaran Ikhwanul Muslimin kurang lebih di 70 negara, mulai dari Eropa, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Tenggara hingga Amerika Serikat dan Kanada. Hingga kini pusat jaringan Ikhwanul Muslimin masih berada di Mesir walau saat ini gerakan Ikhwanul Muslimin mulai dibatasi. Sifat jaringan sangat fleksibel dan setengah tertutup. Nama Ikhwanul Muslimin berbeda-beda di setiap negara. Meskipun demikian, semua disatukan oleh pemikiran dan metodologi Ikhwan. Kekuatan utama gerakan ini adalah pembentukan kelompok – kelompok pengajian (halaqoh) Secara umum, gerakan Ikhwanul Muslimin sekarang ini terbelah dalam dua arus besar, yakni : Ikhwanul Muslimin Tarbiyah dan Ikhwanul Muslimin Jihad.

Ikhwanul Muslimin versi tarbiyah merupakan ikhwanul Muslimin versi resmi. Secara internasional dikendalikan oleh *Mursyid Am* ketujuh yaitu Muhammad Mahdi Akif. Ikhwanul Muslimin versi Tarbiyah tidak terlalu radikal. Tujuan utamanya tetap, yaitu membentuk “*daulah Islamiyah*”. Namun, cara yang ditempuh bersifat *non* - kekerasan. Mereka dapat memanfaatkan instrumen demokrasi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Kemenangan partai Ikhwanul Muslimin di Aljazair, FIS, menjadi momentum penting bahwa jalur tarbiyah, moderat dan parlementarian, dapat menemukan efektivitasnya. Model tarbiyah kemudian

---

<sup>19</sup> Alamsyah M.Dja'far dalam jurnal “*Memahami Gerakan Islam Transnasional*” diterbitkan Agustus 2009

diterima secara luas di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Model ini sekarang menjadi katup penyelamat penting, tatkala Ikhwanul Muslimin Jihadi sedang terpukul di beberapa negara.

Perkembangan mutakhir memperlihatkan, gerakan Ikhwan Tarbiyah telah memperoleh kursi di parlemen secara cukup meyakinkan sekitar tahun 2004 - 2009; diantaranya adalah:<sup>20</sup>

- Mesir, 88 kursi (20 persen)
- Aljazair, 38 kursi (7 persen)
- Bahrain, 4 kursi dari 12 kursi (33 persen)
- Jordania, 20 kursi dari 84 kursi (23 persen).
- Kurdistan, 13 persen dari 275 (5 persen)
- Kuwait, 4 kursi dari 50 ( 8 persen)
- Maroko, 42 kursi dari 325 ( 13 persen)
- Palestina, 74 kursi dari 132 (56 persen)
- Tunisia, (14 persen)
- Yaman, 46 kursi dari 301 (22,6 persen)
- Turki, (34 persen)
- Bangladesh, 18 dari 300 kursi (6 persen)

---

<sup>20</sup> Supriyadi, Agus. Dalam presentasi dengan tema *“gerakan islam transnasional dan pengaruhnya di Indonesia”*.

- Indonesia, 45 kursi dari 550 kursi (8 persen)

Dengan data diatas maka Ikhwanul Muslimin jelas sudah menjadi Gerakan Islam Transnasional yang sudah sangat kental di negara – negara yang mayoritas Muslimin, sehingga mampu membuat kebijakan yang sama seperti ikhwanul Muslimin Pusat (Mesir).

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan rangkaian latar belakang dan perumusan masalah yang telah diajukan serta kerangka dasar pemikiran yang coba ditawarkan dalam kajian ini, telah mendorong penulis untuk merumuskan hipotesa bahwa : “Strategi politik yang di usung Ikhwanul Muslimin sebagai Gerakan Islam Transnasional dalam merespon penetapan mereka sebagai gerakan Terorris oleh pemeritah mesir pasca digulingkannya Mursi adalah dengan melakukan reaksi baik tingkat domestik (Mesir) dan Internasional karena Ikhwanul Muslimin adalah sebuah Gerakan Transnasional”.

#### **E. Manfaat Penulisan**

Diharapkan ada sebuah manfaat yang ditimbulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberikan gambaran tentang isu – isu yang muncul dalam dunia yang terglobalisasi dewasa ini dan memberikan penjelasan tentang respon Ikhwanul Muslimin setelah ditetapkannya sebagai gerakan terroris oleh pemerintah Mesir pasca digulingkannya Mursi baik yang ada di Mesir dan berbagai Negara.
2. Memberikan pandangan tentang strategi Ikhwanul Muslimin dalam *memobilisasi* Ikhwanul Muslimin diberbagai Negara dalam mendukung penolakan Ikhwanul

Muslimin sebagai Gerakan Terrois oleh pemerintah Mesir pasca digulingkannya Mursi.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, akan ditemukan salah satu unsur yang juga dianggap penting dan sebagai syarat bagi sebuah tulisan yang dianggap ilmiah, yaitu metodologi penelitian atau teknik pengumpulan data. Berdasarkan hal tersebut, metodologi penelitian dalam penulisan karya ini menggunakan metode riset pustaka (*library research*), yaitu melalui pengumpulan data dari referensi buku, majalah, jurnal – jurnal ilmiah dan media cetak lainnya. Salain itu, penulis juga menggunakan pengumpulan data melalui situs – situs internet yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Beberapa metode ini dilakukan karena metode ini lebih mempermudah dan mempersingkat waktu dalam proses penelitian.

## **G. Ruang Lingkup Penelitian**

Suatu batasan penelitian menjadi penting untuk dituliskan agar tujuan penulisan tidak melebar pada dimensi waktu dan konteks persoalan yang lain. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dibatasi hanya sampai pada strategi politik Ikhwanul Muslimin di luar Mesir dalam memberi bantuan kepada Ikhwanul Muslimin Mesir setelah ditetapkannya Ikhwanul Muslimin sebagai Gerakan Terroris oleh Pemerintah Mesir setelah digulingkannya Mursi (2014). Kemungkinan yang akan muncul diluar jangkauan priode dan negara tersebut tidak akan dibahas di dalam penelitian ini.



## H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab, masing – masing bab akan mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

**Bab Pertama**, merupakan bab pendahuluan, pada bab ini akan membuat beberapa unsur metodologi yang harus dipenuhi dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah. Maka pada bagian ini pula akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesis, manfaat penulisan, metode penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab Dua**, pada bab ini akan dijelaskan tentang sejarah berdirinya gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan akan menjelaskan perubahan orientasi gerakan Ikhwanul Muslimin dari gerakan dakwah Islam menjadi gerakan organisasi politik, serta sikap politik Ikhwanul Muslimin, dan sejarah singkat perkembangan Ikhwanul Muslimin sebagai Gerakan politik dari mulai awal berdiri sampai revolusi Mesir, era Gama Abdul nasser, era Anwar Sadat dan Husni Mubarrak.

**Bab Tiga**, pada bab ini akan menjelaskan tentang proses kemenangan Mursi sebagai presiden Mesir yang diusung oleh Ikhwanul Muslimin, seta perjalanan politik Ikhwanul Muslimin saat Mursi sebagai Presiden Mesir, serta menjelaskan kronologi singkat kudeta presiden Mursi dan kronologi serta reaksi Ikhwanul Muslimin saat ditetapkan sebagai teroris oleh pemerintah Mesir pasca digulingkannya presiden Mursi.

**Bab Empat**, Pada bab ini akan menjelaskan tentang strategi politik Ikhwanul Muslimin Mesir sebagai Gerakan Islam Transnasional dalam menolak penetapan sebagai organisasi teroris, baik yang ada di Mesir maupun diluar Mesir pasca digulingkannya Mursi.

**Bab Lima**, pada bab lima ini akan dijelaskan tentang kesimpulan dari hasil analisis penelitian sebagai jawaban terhadap pokok permasalahan yang diangkat.